

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Cirebon adalah salah satu daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang terletak di bagian ujung timur Laut Jawa. Selain merupakan pusat kegiatan pemerintah daerah, sosial politik, pendidikan, dan kebudayaan, juga merupakan pusat kegiatan perekonomian yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan daerah ini sebagai daerah tujuan wisata, perdagangan, pelabuhan, dan industri.

Secara geografi wilayah Cirebon merupakan daerah pantai, daerah dataran rendah, daerah perbukitan dan daerah pegunungan. Kota Cirebon terletak pada lokasi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di wilayah pantai menjadikan Kota Cirebon memiliki wilayah dataran yang lebih luas dibandingkan dengan perbukitannya. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Kota Cirebon sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kedung Pane, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kalijaga, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa. Sedangkan Kabupaten Cirebon terletak di bagian timur dan merupakan batas, sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Kabupaten Cirebon sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, sebelah timur berbatasan dengan Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (pusdalisbang.jabarprov.id).

Kondisi geografi yang strategis tersebut merupakan keuntungan bagi Wilayah Cirebon terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Berdasarkan keuntungan geografi tersebut, Cirebon menjadi jalur lalu lintas kegiatan perekonomian daerah. Banyak pusat industri yang berdiri di Wilayah Cirebon. Hal ini berdampak pada meningkatnya kegiatan perekonomian

Wilayah Cirebon. Tidak mengherankan jika Cirebon berkembang sebagai kota pelabuhan, perdagangan, industri, dan budaya di Jawa Barat.

Sementara itu, berdasarkan pembagian wilayah pemerintahan, Cirebon dibagi menjadi dua yaitu Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan dan 446 kelurahan/desa.

Pendapatan Daerah merupakan titik tumpu pembangunan suatu daerah. Umumnya jumlah pendapatan daerah pemerintah kota lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan daerah pemerintah kabupaten. Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten lebih rendah daripada PDRB kota. Hal ini berimplikasi pada proporsi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah daerah. Aktivitas ekonomi dan pendapatan (*income*) di kota juga lebih besar daripada kabupaten (Prud'homme,1995:201-220). Jumlah pendapatan daerah Kota dan Kabupaten Cirebon sangat jauh berbeda. Jumlah pendapatan daerah Kabupaten Cirebon hampir dua kali lipat besarnya dari jumlah penerimaan daerah Kota Cirebon.

Hal tersebut ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah pendapatan daerah Kota dan Kabupaten Cirebon dengan salah satu daerah yang terdiri dari pemerintahan kota dan kabupaten yaitu Kota dan Kabupaten Bandung dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perbandingan Pendapatan Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon
dengan Kota dan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

Tahun	Bandung		Cirebon	
	Kota	Kabupaten	Kota	Kabupaten
2008	2.018.841.349.000	1.467.678.537.000	555.186.378.000	1.116.407.022.000
2009	2.402.466.979.000	1.954.420.909.000	637.259.934.000	1.285.732.521.000
2010	2.440.168.435.000	2.042.977.658.000	677.729.110.510	1.487.606.295.000
2011	3.115.296.524.000	2.453.416.214.000	838.617.783.420	1.777.008.932.000
2012	3.390.453.856.000	2.445.106.797.000	857.411.872.340	1.994.518.571.000

Sumber: jabar.bps.go.id/statistik-keuangan-daerah (data diolah)

Jumlah pendapatan daerah untuk Kota Bandung lebih besar hampir dua kali lipat dari pendapatan daerah Kabupaten Bandung, sedangkan yang terjadi di Cirebon, jumlah pendapatan daerah Kabupaten Cirebon lebih besar hampir dua kali lipat dari jumlah pendapatan daerah Kota Cirebon.

Untuk itu, penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintahan Kota dan Kabupaten Cirebon untuk periode anggaran dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rentang waktu selama lima (5) tahun terakhir agar informasi yang dihasilkan lebih akurat dan relevan dan mendekati dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Kota dan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Sebagai entitas pemerintahan yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Agar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih tepat sasaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal yang ada dalam wilayahnya dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi, sebagai implikasinya peran pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya sebagai pertanggungjawabannya dalam mengelola pemerintahannya sendiri, terutama dalam bidang keuangan. Untuk itu, diperlukan pengukuran mengenai kinerja keuangan untuk melihat bagaimana pencapaian dari suatu hasil kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon dan Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon bahwa di tahun 2011 jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon hanya mencapai Rp 120.130.531.059 dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 137.147.929.763, kemudian jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon hanya mencapai Rp 189.609.065.744 dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 204.777.770.274. Tidak tercapainya target dari yang seharusnya pada realisasi pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon menandakan bahwa pemerintah daerah kurang mampu menggali potensi sumber daya lokal yang berada di wilayahnya secara optimal.

Dalam artikel Pikiran Rakyat yang dimuat tanggal 31 Desember 2011(www.pikiran-rakyat.com), APBD Kota Cirebon 2012 mengalami defisit Rp16,7 miliar. Defisit tersebut terjadi karena tidak seimbangnya antara pendapatan daerah yang sebesar Rp 787,4 miliar dengan belanja daerah sebesar Rp 804,2 miliar. Dalam artikel Kompas Nasional yang dimuat tanggal 2 Februari 2010 (www.nasional.kompas.com), APBD Kabupaten Cirebon tahun 2010 dari Rp1,27 triliun pendapatan Kabupaten Cirebon, pengeluarannya mencapai Rp 1,35 triliun, defisit hampir Rp 80 miliar.

Peristiwa tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah kurang mampu mengelola sumber pendapatan daerahnya secara optimal sehingga pengeluarannya lebih besar dari pendapatannya.

Untuk dapat mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan suatu daerah.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain PAD dan Dana Perimbangan, juga terdapat satu komponen yang dapat menjadi sumber pendapatan suatu daerah, yaitu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki peranan yang cukup penting sebagai sumber penerimaan untuk pembangunan suatu daerah yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu (Adi,2006). Berikut ini merupakan jumlah penerimaan daerah Kota dan Kabupaten Cirebon tahun 2008 – 2012 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2**Jumlah Pendapatan Daerah Kota Cirebon Tahun 2008–2012**

Tahun	Jenis Penerimaan						Total Penerimaan	Kenaikan (%)
	Pendapatan Asli Daerah		Dana Perimbangan		Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			
	Jumlah (Rp)	Kontribusi	Jumlah (Rp)	Kontribusi	Jumlah (Rp)	Kontribusi		
2008	63.453.776,00	11,43%	436.898.492,00	78,69%	50.595.308,00	9,11%	555.186.378,00	-
2009	77.318.390,00	12,13%	474.292.926,00	74,43%	85.648.618,00	13,44%	637.259.934,00	14,78
2010	90.795.674,57	13,40%	486.326.699,21	71,76%	100.606.736,73	14,84%	677.729.110,51	6,35
2011	120.130.531,06	14,32%	533.161.934,98	63,58%	185.325.317,38	22,10%	838.617.783,42	23,74
2012	149.489.858,00	17,44%	653.010.223,00	76,16%	69.625.219,00	8,12%	857.411.872,34	2,24

Sumber: jabar.bps.go.id/statistik-keuangan-daerah (data diolah)

Tabel 1.3**Jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008–2012**

Tahun	Jenis Penerimaan						Total Penerimaan	Kenaikan (%)
	Pendapatan Asli Daerah		Dana Perimbangan		Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			
	Jumlah (Rp)	Kontribusi	Jumlah (Rp)	Kontribusi	Jumlah (Rp)	Kontribusi		
2008	101.512.670,00	9,09%	873.786.726,00	78,27%	141.107.626,00	12,64%	1.116.407.022,00	-
2009	116.095.438,00	9,03%	991.493.640,00	77,12%	178.143.443,00	13,86%	1.285.732.521,00	15,16
2010	143.657.564,00	9,66%	1.045.997.902,00	70,31%	297.950.829,00	20,03%	1.487.606.295,00	11,87
2011	189.609.065,00	10,67%	1.099.402.437,00	61,87%	487.997.430,00	27,46%	1.777.008.932,00	23,84
2012	230.172.843,00	11,54%	1.327.558.618,00	66,56%	436.787.110,00	21,90%	1.994.518.571,00	6,61

Sumber: jabar.bps.go.id/statistik-keuangan-daerah (data diolah)

Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 Jumlah Pendapatan Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk Kota Cirebon, terdapat peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 14,78%. Di tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 6,35% dari tahun 2009. Di tahun 2011 terdapat peningkatan yang cukup signifikan sebesar 23,74% dari tahun 2010. Di tahun 2012 hanya terjadi peningkatan sebesar 2,24% dari tahun sebelumnya.

Hal serupa juga tergambar dari jumlah pendapatan daerah untuk Kabupaten Cirebon dari tahun 2008-2012. Secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 15,16% dari tahun 2008 ke tahun 2009. Di tahun 2010 terdapat peningkatan sebesar 11,87% dari tahun 2009. Di tahun 2011 terdapat peningkatan yang cukup signifikan sebesar 23,84% dari tahun 2010. Di tahun 2012 hanya terjadi peningkatan sebesar 6,61% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan Jumlah Pendapatan Daerah Kota Cirebon untuk Tahun 2008-2012 yang tersaji dalam Tabel 1.1, menunjukkan bahwa jumlah kontribusi Dana Perimbangan cukup besar terhadap jumlah penerimaan daerah dibandingkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-

Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Besar kontribusi yang diberikan Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah mencapai lebih dari 50% yaitu sebesar 63%-78% (tahun 2008-2012), hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan cukup mendominasi jumlah pendapatan daerah Kota Cirebon. Pendapatan Asli Daerah sendiri hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 12%-16% terhadap jumlah pendapatan daerah Kota Cirebon (untuk tahun 2008-2012). Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 9%-22% terhadap jumlah pendapatan daerah Kota Cirebon (tahun 2008-2012). Di tahun 2012, terjadi penurunan jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 61,68% dari tahun 2011.

Begitu juga yang terlihat pada Tabel 1.2 Jumlah Penerimaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk Tahun 2008-2012, bahwa jumlah kontribusi Dana Perimbangan cukup besar dan mendominasi jumlah pendapatan daerah dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Besar kontribusi yang diberikan Dana Perimbangan terhadap jumlah pendapatan daerah Kabupaten Cirebon mencapai lebih dari 50% yaitu sebesar 61%-78% (tahun 2008-2012). Pendapatan Asli Daerah sendiri hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 9%-10% (untuk tahun 2008-2012). Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 12%-27% terhadap jumlah pendapatan daerah Kabupaten Cirebon. Di tahun 2012, terjadi penurunan jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 22,99% dari tahun 2011.

Kedua tabel diatas sama-sama menunjukkan bahwa besarnya jumlah pendapatan suatu daerah didominasi oleh Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan alokasi dana yang bersasal dari APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan desentralisasi fiskal. Hal ini berhubungan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh suatu daerah. Jika jumlah Pendapatan Asli Daerah cukup kecil, maka jumlah Dana Perimbangan yang diperoleh suatu daerah tersebut semakin besar, menandakan bahwa pemerintah daerah masih bergantung kepada transfer atau bantuan dari pemerintah pusat dan daerah

tersebut belum dapat menggali potensi sumber daya lokal yang dimiliki daerahnya secara optimal.

Hasil penelitian Simanullang (2013) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian yang dilakukan Rukmana (2013) menunjukkan bahwa secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, dimana retribusi daerah adalah bagian dari pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Wenny (2012) menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, dimana pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian Julitawati (2012) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kinerja Keuangan yang diukur menggunakan rasio efisiensi. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahim (2008) menyebutkan bahwa Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Takalar melalui DAU dan DAK tidak memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut juga membuktikan bahwa Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Takalar juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Takalar. Kemudian hasil penelitian Ariani (2010) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dimana dana alokasi umum merupakan bagian dari dana perimbangan.

Untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, belum banyak penelitian yang menguji pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah tersebut dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Perimbangan, perlu dilakukan pengujian apakah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ikut berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk itu peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Cirebon tahun anggaran 2008-2012)”.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- 2) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon secara simultan untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- 3) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon secara parsial untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- 4) Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon secara parsial untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- 5) Bagaimana pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon secara parsial untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon secara simultan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon secara parsial dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon secara parsial dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam beberapa aspek yaitu:

- 1) Aspek teoritis

Dari segi aspek teoritis, kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah serta mengetahui potensi lokal yang dimiliki pemerintah Daerah Cirebon.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Aspek praktis

Dari segi aspek praktis, kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengevaluasi penilaian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon.

b. Bagi publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada publik mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisi fenomena, perumusan masalah yang diteliti berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang terkait dengan Pendapatan Daerah, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas perumusan

masalah dan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, variabel operasional yang digunakan, tahapan penelitian, populasi dan sampel, cara pengumpulan data dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran atau rekomendasi yang diberikan penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan serta kelengkapan akhir yang terdiri dari daftar pustaka sumber referensi penelitian dan lampiran.